

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI KASUS
KEKERASAN SEKSUAL SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI
KABUPATEN SLEMAN**

Farhana Tri Febriati¹, Rizky Septiana Widyaningtyas²

INTISARI

Pandemi Covid-19 di Indonesia sangat berpengaruh terhadap naiknya kasus kekerasan seksual. Pemerintah Daerah memiliki peran dan wewenang dalam mengurus urusan di wilayahnya masing-masing, dalam hal ini kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sleman juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Upaya Pemerintah Daerah dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) rupanya memberikan dampak yang positif terkait penanganan dan perlindungan korban kasus kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam menangani dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman, serta untuk mengetahui lebih jauh efektifitas penanganan oleh UPTD PPA terhadap jumlah kasus kekerasan seksual.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian diuraikan secara deskriptif dengan metode naratif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa efektifitas dari pembentukan UPTD PPA dapat dinilai dari dua hal, yaitu jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dan penanganan korban kekerasan seksual selama masa pandemi Covid-19. Walaupun angka kekerasan seksual meningkat, Pemerintah telah mampu meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pelaporan. Di sisi lain, masih terdapat banyak hambatan dalam melakukan penanganan terhadap korban pada masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kekerasan seksual, pandemi Covid-19.

¹ Mahasiswa Program Sarjana pada Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN HANDLING CASES OF SEXUAL VIOLENCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN SLEMAN DISTRICT

Farhana Tri Febriati¹, Rizky Septiana Widyaningtyas²

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic in Indonesia has had a huge impact on the rise in cases of sexual violence. The Regional Government has a role and authority in managing affairs in their respective areas; in this case, the sexual violence that occurred in Sleman Regency is also the responsibility of the Sleman Regency Regional Government. The local government's efforts to form the UPTD PPA seem to have had a positive impact on the handling and protection of victims of violence. This study aims to analyze the extent of the role of the Regional Government of Sleman Regency in handling and resolving cases of sexual violence that occurred during the Covid-19 pandemic in Sleman Regency, as well as find out more about the effectiveness of handling by the UPTD PPA on the number of cases of sexual violence.

This research was conducted using normative-empirical legal research methods. The data used in this study consisted of primary data in the form of interview results and secondary data obtained from literature studies. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively. The research results are described descriptively using the narrative method.

The results of research have shown that the effectiveness of the formation of the UPTD PPA can be judged from two things: the number of cases of sexual abuse and the treatment of victims of sexual violence during the Covid-19 pandemic. Although the rates of sexual violence are increasing, the government has managed to increase public concern for reporting. On the other hand, there are still many obstacles to handling victims of the Covid-19 pandemic.

Keyword: Regional Government of Sleman Regency, Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA), sexual violence, the Covid-19 pandemic.

¹ Undergraduate Student at the Departement of Administrative Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Lecturer of the Departement of Administrative Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.